

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan keniscayaan dalam dinamika kehidupan dan perkembangan manusia bahkan tidak mungkin memisahkan pembangunan dengan kehidupan manusia. Pembangunan hingga saat ini senantiasa diyakini sebagai jalan yang harus ditempuh oleh para pemangku kepentingan di setiap daerah untuk dapat memajukan daerah tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pembangunan seringkali sangat beragam pada tiap-tiap konteks masyarakat (Ruslin, 2017). Sehingga, wacana pembangunan kota tidak akan pernah mati dan akan terus diproduksi dan direproduksi, hingga memenuhi ruang-ruang pertarungan wacana pembangunan tersebut.

Pembangunan dilakukan tentunya menyesuaikan kondisi wilayah di daerah tersebut, Kota Majene sendiri adalah wilayah yang memiliki garis Pantai yang Panjang, dalam artian kota Majene termasuk wilayah pesisir. Dalam hal ini Pembangunan tentunya memanfaatkan ruang-ruang pesisir untuk mendukung kemajuan daerah tersebut. Pemanfaatan ruang-ruang pesisir dalam Pembangunan suatu daerah bukanlah wacana yang baru, bahkan ini sudah menjadi isu global. Banyaknya kota-kota yang sudah melakukan pemanfaatan ruang pesisir.

Seperti yang terjadi di Kota Baubau, pengembangan Kawasan pesisir adalah salah satu Upaya misi Pembangunan yang berbasis kota Pantai atau *waterfront city*. Penataan Kawasan pesisirnya kota tercantum dalam RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota). Sesuai dengan prioritas pembangunannya sebagai kota Pantai, maka Kota Baubau termasuk dalam konsep Pembangunan sebagai usaha menciptakan *waterfront* yang memenuhi kebutuhan kota saat ini dan masa depan dengan cara mereklamasi (Takwin, 2020). Kota Makassar juga menjadi salah satu yang menerapkan Pembangunan dengan memanfaatkan ruang-ruang pesisir, hasil Pembangunan tersebut sekarang dikenal dengan CPI (Centre Point of Indonesia).

Kota Ambon juga salah satu kota yang memanfaatkan ruang pesisir untuk menunjang kemajuan suatu daerah. Kota Ambon sebagai kota provinsi, tentunya akan berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan Pembangunan dan kepadatan penduduk yang memiliki kecenderungan didominasi factor urbanisasi penduduk dan perubahan lingkungan, maka untuk mendukung dan mengatur kondisi tersebut, dalam penataan ruang wilayah Kota Ambon bertujuan untuk mewujudkan kota sebagai *waterfront city* untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan (Notanubun & Mussadun, 2017). Dengan pola pertumbuhan penduduk yang memadai daerah pesisir, maka Kota Ambon membuat perencanaan *waterfront city*.

Dengan pola yang sama Kota Majene yang memiliki karakteristik wilayah pesisir, terletak di pesisir Pantai barat pulau Sulawesi dan Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 5 Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir Pantai barat. Kabupaten Majene tergolong dalam daerah pesisir yang Sebagian

penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Daerah Pantai di Majene ini merupakan salah satu daya Tarik atau tujuan wisata. Juga terdapat kampung nelayan di pesisir Pantai dan laut yang berada di Kota Majene yang menunjukkan identitas sebagai daerah pesisir.

Pemerintah daerah Majene mengambil Langkah untuk melakukan Pembangunan dengan memanfaatkan wilayah pesisir, mengambil konsep *waterfront city* dengan visi mengelola ruang pesisir tersebut untuk kemajuan daerah dan menciptakan wajah baru bagi garis Pantai Majene yang mampu menunjukkan citra Kota Majene sebagai wilayah pesisir dan tentunya tanda pengenalan suatu kota dalam wacana global.

Konsep *waterfront city* sudah menjadi wacana global, sebab dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyaknya pengakuan mengenai pentingnya Pembangunan tepi laut yang berkelanjutan sebagai sarana untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi, social, dan lingkungan. Seperti yang terjadi di kota Jeddah, Dimana Jeddah adalah pusat perkotaan terbesar di wilayah tersebut. Tantangan urbanisasi yang pesat dan pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi telah menjadi tantangan, sehingga MaKoPembangunan kota tepi laut atau *waterfront city* juga diterapkan di kota Jeddah dengan pendekatan komprehensif (Zaki & Hegazy, 2023).

Pola pertumbuhan Penduduk merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah. Analisis kependudukan dan sumberdaya manusia meliputi; perkembangan penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk dalam suatu wilayah. Kemudian jumlah penduduk menurut angka kelahiran dan kematian, penduduk menurut mata pencaharian, dan menurut Angkatan kerja. Secara administrasi lokasi renstra Majene Waterfront City terletak di Kecamatan Banggae dan banggae Timur Kabupaten Majene. Jumlah penduduk Kabupaten Majene tahun 2018 tercatat sebanyak 163.896 jiwa yang terdiri dari 80.068 laki-laki dan 83.828 perempuan (Badan Pusat Statistik Majene, 2023).

Sementara Sebaran penduduk Kabupaten Majene dirinci menurut Kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Banggae yaitu sebanyak 40.646, disusul Kecamatan Banggae Timur sebanyak 30.886 jiwa. Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Banggae adalah kawasan terpadat yaitu 1.616 jiwa/km², disusul Kecamatan Banggae Timur yaitu 1.028 jiwa/km², sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Malunda yaitu 98 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Majene untuk periode 2018 dan 2020 sebesar 1,72 %. Dengan laju tertinggi terdapat di Kecamatan Banggae dengan 1,96 %, kemudian Kecamatan Sendana 1,92 %. Angka pertumbuhan terendah terdapat di Kecamatan Pamboang sebesar 1,2 % (Badan Pusat Statistik Majene, 2023).

Pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene adalah Langkah yang diambil dengan melihat beberapa kota yang sudah menerapkan Pembangunan dengan konsep tersebut. program yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk mengembangkan potensi wisata bahari dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai wilayah yang memiliki garis pantai yang panjang, Majene dianggap memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan, yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Proyek ini diharapkan dapat

menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, serta mempercepat modernisasi infrastruktur.

Pembangunan *Waterfront City* mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majene Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2032. Pada pasal 6 menjelaskan bahwa tentang Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan, dan itu mengambil dua kecamatan yaitu, kecamatan Banggae dan Banggae Timur, karena keduanya merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Oleh karena itu, perencanaan tata ruang sebagai salah satu bagian dalam aktivitas penataan ruang, sesungguhnya merupakan bentuk formulasi kebijakan publik yang terkait dengan pengelolaan ruang kota. Dalam sebuah proses perencanaan akan sangat terkait sekali dengan proses penentuan pilihan-pilihan yang merupakan pengejawentahan dari proses-proses politik yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan publik. Sehingga setiap aktivitas politik yang ada di dalamnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan memiliki titik fokus untuk mencapai sebuah kondisi keruangan dalam konteks *problem solving* (Sutiyoso, 2017).

Sebagaimana yang dibahasakan oleh James F. Anderson mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau seperangkat aktor dalam suatu bidang kebijakan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik itu di tingkat pemerintahan maupun di tingkat masyarakat secara umum (Yakin et al., 2013). Sehingga dalam perencanaan sebuah kebijakan akan terjadi saling Tarik-menarik kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat.

Pada umumnya perhatian terhadap pembangunan seringkali hanya terfokus pada aspek struktur dan bentuk kebijakan yang dihasilkan serta kegiatan yang dilakukan dan efek yang ditimbulkan dari proses pembangunan, Namun pemahaman bahwa pembangunan adalah konsep yang sangat kompleks dan dinamis, pada dasarnya telah menunjukkan pentingnya untuk menaruh perhatian juga pada bagaimana pemahaman dan interpretasi para stakeholder terutama para pembuat kebijakan terhadap konsep pembangunan dan kesesuaiannya pada konteks (Ruslin, 2017).

Aktor pembangunan merupakan seseorang yang memiliki peranan penting dalam penyusunan dan penetapan program pembangunan. kurangnya keterlibatan aktor dapat mempengaruhi hasil pembangunan. Bourdieu menegaskan bahwa aktor yang menempati suatu lingkungan menyiapkan strategi yang berguna untuk posisi tertentu bagi aktor tersebut. Lingkungan tersebut dapat dikatakan sebuah arena yang kemudian dianggap sebagai medan pertempuran. Lingkungan atau arena menjadi tempat bagi aktor bertindak (Qotrun Nada, 2022). Akan tetapi, peran ini secara sederhana diartikan sebagai siapa melakukan apa, apa yang harus dihasilkan, atau dengan arti lain kebijakan dimaknai sebagai kumpulan tindakan yang muncul akibat suatu proses yang dihasilkan dari berbagai aktivitas aktor untuk mencapai tujuan tertentu.

Interaksi aktor pada dasarnya menggambarkan atau menjelaskan hubungan yang saling melengkapi. Aktor merupakan pelaku atau subjek dalam pembangunan,

sedangkan interaksi itu sendiri adalah prosesnya. Pemerintah berperan untuk membuat kebijakan dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan dalam menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta berperan sebagai pendukung yang menyalurkan bantuan berupa dana untuk melakukan pelaksanaan pembangunan. sementara masyarakat adalah subjek dan objek dalam pembangunan (Mahmud, 2020).

Di sisi lain, interaksi antar aktor pembangunan merupakan hubungan yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugasnya serta tidak dapat dipisahkan dari perannya dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap aktor berhak untuk dapat mengusulkan atau membawa kepentingannya baik itu berdasarkan individu atau kelompok. Kemudian juga bagaimana aktor yang terlibat mempertahankan pendapatnya agar usaha tersebut diterima. Oleh sebab itu, hal ini muncul kepentingan dalam diri aktor untuk mampu mempengaruhi aktor lain dengan tujuan usulannya dapat dijadikan prioritas utama.

Aktor yang berinteraksi dalam rancangan pembangunan perkotaan, tidak hanya aktor yang bersifat formal, akan tetapi aktor yang nonformal juga ikut andil dalam setiap rancangan pembangunan kota. Aktor formal dan nonformal saling memiliki porsi kepentingan yang dibawa untuk bagaimana pembangunan tersebut memberikan efek bagi dirinya maupun kelompoknya. Sehingga terkadang kesejahteraan masyarakat itu jadi bahan taruhan dalam proses pembangunan perkotaan.

Secara jelas juga dijelaskan dalam pendekatan atau teori rezim (Stone et al., 1993), berasumsi bahwa efektivitas pemerintahan daerah sangat bergantung pada kerja sama para pelaku non-pemerintah dan pada kombinasi pemerintah daerah dengan sumberdaya nonpemerintah. Kesejahteraan ekonomi bergantung pada investasi swasta. Namun, secara pemahaman yang luas, agar sebuah perencanaan pembangunan efektif, pemerintah harus memasukan kapasitas mereka dengan kapasitas berbagai pelaku nonpemerintah.

Heger dan Rohrbeck menjelaskan juga bahwa mengakomodasikan kepentingan merupakan tugas yang sulit karena masing-masing dari mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik aktor yang bebas menetapkan tujuannya sendiri dan melakukan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Pada prinsipnya setiap anggota lembaga tidak bekerja dengan baik jika tidak didukung dengan jaringan kerja yang kuat, selanjutnya jaringan kerja yang kuat apabila mendapat dukungan dari hubungan kerja yang baik dan bersifat memiliki pengertian-pengertian dalam pola pikirnya ataupun tindakannya.

Tentunya dapat kita lihat dan berdasarkan realitas yang ada bahwa pola hubungan yang terjadi antara para aktor belum cukup baik, karena hubungan yang terbangun masi didasari dengan konflik *interest*. Masing-masing dari mereka saling memprioritaskan usulan mereka dan tidak mempedulikan pihak lain. Bahkan pemangku kepentingan utama dikuasai oleh aktor yang memiliki kedudukan tinggi serta memiliki *power* kuat untuk mampu mempengaruhi pihak lain untuk percaya dan terpengaruh dengan usulannya.

Seringkali sebagian aktor akan menganggap dirinya hanya dilibatkan di awal saja dan pada tahap pengambilan keputusan didominasi oleh penguasa. Kerja sama antar aktor menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, dengan demikian, interaksi dan kerja sama yang efektif antar aktor harus dilakukan oleh kesadaran kolektif antar aktor yang terlibat untuk mencapai tujuan tertentu yaitu kesejahteraan masyarakat (Qotrun Nada, 2022). Namun dalam, beberapa penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa keputusan final terletak dilingkungan formal.

Penelitian yang dilakukan Kushandajani dan Indah Ayu Permana (Kushadajani & Permana, 2020), mengatakan bahwa kemampuan seorang aktor formal yang mampu melakukan hubungan dengan aktor lain, sehingga itu adalah kunci keberhasilan dalam menyusun program pembangunan. juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nafiah Ariyani, Akhmad Fauzi, dan Farhat Umar (Ariyani et al., 2020), menjelaskan bahwa model hubungan aktor pemangku kepentingan dan aktor lainnya dalam konteks pembangunan kota ditentukan oleh pembuat kebijakan dimana aktor yang dominan adalah aktor yang bersifat formal.

Dalam penelitian yang juga dilakukan oleh Bertrand Zuideau (Sakinah, 2018), zuideau melihat bahwa tantangan dalam upaya untuk memanfaatkan ruang dan wilayah dalam pembangunan yang berkelanjutan terkait dengan bagaimana logika keberlanjutan dipahami dan kompetisi yang terjadi selama proses pembangunan. sehingga Zuideau melihat bahwa pemerintah dengan segala fungsi dan tanggung jawabnya menjadi sangat penting, sebab ditangan institusi-institusi pemerintah nantinya akan hadir landasan dasar atas kebijakan pembangunan kota yang akan dibentuk dan ditetapkan. Secara sederhana dari beberapa penelitian sebelumnya yang baik oleh zuindeau, Kushandajani, Nafia Ariyani dan sebagainya, mengindikasikan bahwa dalam proses pembangunan, aktor formal yang sangat memainkan perannya.

Penelitian yang berkaitan dengan konteks pembangunan, dengan menemukan hasil yang berbeda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fadli Afriandi, Rizky Octa Putri Charin, Fachriza Ariyadi (Afriandi et al., 2021a), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aktor informal yang dimana aktor ini berada di luar kelembagaan formal mempunyai kapabilitas dan kapasitas untuk melakukan segala cara mengintervensi pada system kerja aktor formal. Aktor informal ini dapat berubah pownya selama proses pembangunan, sebelumnya memiliki peran sebagai aktor yang bersifat klien, akan tetapi dalam perkembangannya dapat menjadi aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar.

David Gibbs dan Andrew E.G. Jonas Jonas (Sakinah, 2018), melalui studi mereka tentang kebijakan lingkungan dan pembangunan perkotaan menunjukkan juga bahwa adanya faktor intervensi. Mereka menemukan bahwa terdapat suatu kekuatan tertentu yang akan memberi pengaruh signifikan pada hasil dari proses tersebut. Sehingga sangat menarik untuk melihat hubungan aktor yang kemudian terlibat dalam proses pembangunan, aktor formal dan informal sama-sama memiliki power, akan tetapi dalam perkembangannya, seringkali aktor informal yang dapat melakukan intervensi terhadap proses kebijakan pembangunan perkotaan.

Apa yang kemudian terjadi di Kabupaten Majene, adanya pembangunan *Waterfront City* dengan memanfaatkan wilayah pesisir dalam pengembangan perkotaan yang memiliki tujuan untuk melahirkan kejesahatan masyarakat, terkhusus masyarakat pesisir (Nelayan). Kebijakan pembangunan tersebut sudah masuk dalam rancangan tata ruang dan wilayah Kabupaten Majene. Sehingga pembangunan tersebut dilakukan, Namun peneliti memiliki keresahan akan melihat konteks pembangunan tersebut. Sebab, ada aliansi penggerak lingkungan dan beberapa masyarakat yang melakukan aksi penolakan terhadap pembangunan tersebut.

Salah satu warga yang bernama Ridwan dalam wawancara yang dilakukan oleh Agus Mawan seorang wartawan atau aktivis pegiat lingkungan dan berita ini dapat dilihat di website *Mongabay* situs berita lingkungan (Mawan, 2020), berprofesi sebagai nelayan, di sebuah perkampungan nelayan, bercerita bahwa pembangunan tersebut mendatangkan dampak negative bagi kami, karena kami sulit melakukan perbaikan kapal di darat, karena adanya pembangunan tanggul. Garis pantai sudah mundur puluhan meter, setelah adanya reklamasi. Dan kemudian juga adanya tanggul menimbulkan masalah lain bagi ridwan dan lainnya, sebab menyebabkan ombak balik yang kemudian bertabrakan dengan ombak datang, menjadikan lautan pesisir itu jauh dari tenang, ini juga berdampak pada kapal-kapal nelayan yang berlabuh di pinggir tanggul karena akan dapat menyebabkan kebocoran. Berangkat dari cerita yang singkat dari bapak ridwan, bahwa pembangunan tersebut merubah kehidupan perkampungan nelayan. Dan jelas dampaknya tidak berhenti dari situ, dampak lingkungan juga pasti ada.

Adanya pergerakan suatu organisasi Aliansi Selamatkan Nelayan dan Pesisir (ASNP) (Agus Mawan, 2020). Turun melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Majene dengan beberapa tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan pembangunan *Waterfront City*. Termasuk salah satunya pertanggungjawaban pemerintah atas kerugian nelayan sejak jalan dan tanggul dibangun, akan tetapi hasil dari demonstrasi itu tidak menemukan titik temu, karena dengan alasan bupati dan wakilnya sedang dinas keluar kota.

Survei ASNP terkait Pembangunan *Waterfront City* pada Agustus-September 2019 menemukan bahwa padang lamun banyak tertimbun, sementara tepi laut kini berlumpur sedalam paha orang dewasa, mengancam kelestarian terumbu karang beserta ekosistemnya. Berdasarkan survei ini, kemudian salah satu hal yang juga ditemukan bahwa data persebaran biota dalam dokumen Amdal berbeda dengan apa yang ditemukan di lapangan. Fenomena tersebut sudah di publikasikan oleh media cetak online ekuatorial.com (Agus Mawan, 2020).

Kejadian tersebut banyaknya penolakan terhadap pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene, maka penulis tertarik untuk mengangkat kejadian ini sebagai objek penelitian penulis. Dengan alasan, bahwa setiap proses perencanaan kebijakan pembangunan selalu berhadapan siapa saja aktor yang terlibat dan tentunya ada Tarik menarik kepentingan, dan tentunya adanya interaksi aktor formal dan informal, akan tetapi siapa yang kemudian menjadi aktor yang dominan atau memegang kendali,

sehingga pembangunan *Waterfront City* berjalan terus, meskipun adanya penolakan dari masyarakat yang juga sebagai aktor dalam pembangunan tersebut.

Dengan demikian, berangkat dari peristiwa yang terjadi di Kabupaten Majene, dan juga beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa politik perkotaan terkait dengan perencanaan pembangunan perkotaan memang merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Ada banyak sisi yang dapat dicermati dan dianalisa. Setiap sisi analisa menawarkan sesuatu hasil analisa tertentu yang dapat menunjukkan kondisi kebijakan pembangunan kota. Beberapa kajian tersebut menyentuh beragam aspek yakni pada interaksi aktor-aktor penting dalam proses kebijakan terutama pada konteks interpretasi mereka pada makna pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang akan dihasilkan melalui suatu kebijakan pembangunan.

Pada prakteknya senantiasa ada kontroversi diantara pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan sendiri termasuk yang sedang terjadi di Kabupaten Majene. Institusi-institusi yang memegang peranan penting yakni lembaga eksekutif dan legislative yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan pembangunan, dan juga aktor-aktor yang bersifat informal juga akan terlibat didalamnya. Sehingga peneliti mengangkat judul “politik pembangunan kota: pro dan kontra dalam pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene”.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene melahirkan beberapa pro dan kontra dalam interaksi aktor-aktor tentunya, sama halnya dengan kota-kota sebelumnya yang memanfaatkan tepi laut dalam pengembangan perkotaan. Berdasarkan argument saya bahwa, pembangunan tersebut akan memberikan dampak keuntungan ekonomi, seperti peningkatan wisata dan tentunya lapangan kerja, akan tetapi tentunya juga ada dampak negative, seperti penggusuran lahan, perubahan lingkungan pesisir (masyarakat nelayan), dan konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan, hal ini yang kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah dalam tulisan ini, Adapun pertanyaan utama dalam riset ini adalah bagaimana dinamika politik dalam pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene?

Berdasarkan hal tersebut maka beberapa pertanyaan turunan yang dapat diajukan dalam riset ini, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kepentingan aktor dalam pembangunan *Waterfron City* yang terjadi di Kabupaten Majene?
2. Bagaimana koalisi aktor dan interaksi aktor dalam kebijakan program pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa kepentingan aktor dalam pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene.
2. Untuk menganalisa koalisi aktor dan bagaimana pola interaksi aktor yang terjadi dalam pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene.

Adapun manfaat dari penelitian ini, penulis berharap semoga manfaat dari penelitian dapat di ambil, antara lain;

1.3.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu politik pada umumnya.
- b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada tingkat strata dua (S2) untuk memperoleh gelar Magister pada Departemen Ilmu Politik Prodi S2 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

1.3.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian diharapkan dapat berguna atau dijadikan sebagai rujukan, referensi, dan pertimbangan terhadap penelitian yang baru yang berkaitan dengan politik Pembangunan yang memanfaatkan tepi laut untuk pengembangan perkotaan dengan konsep pembangunan *Waterfront City*.
- b. Bagi pemerintah, sebagai bahan referensi dan evaluasi kinerja dengan mengetahui kemajuan dan kemunduran atas pengimplemntasian kebijakan pembangunan perkotaan dengan memanfaatkan tepi laut (*Waterfront City*), terkhusus bagi pemerintah Kab. Majene sendiri.
- c. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini, penulis akan lebih paham dan megetahui serta menemukan beberapa fakta berupa langkah, upaya serta proses dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tentang pemanfaatan tepi laut yang dijadikan sebagai solusi untuk melakukan pembangunan perkotaan.

1.4 Tinjauan Teori

1.4.1 Teori Urban Regime Clarence Stone

Dalam teori ini akan menjelaskan bahwasanya elemen-elemen yang berada di system yang akan mempengaruhi warna produk dari sebuah kebijakan pemerintah. Lingkungan politik dalam kebijakan terdapat beberapa faktor sebelum membuat sebuah kebijakan. Seorang ahli bernama Robert Dahl yang dimana dalam penelitian politik perkotaan ada cara untuk memahaminya, dengan cara meneliti keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan dan melacak hal-hal yang akan mempengaruhi kebijakan tersebut, dari analisis tersebut apa yang terjadi dipemerintah kota adalah hasil dari beberapa persaingan antar kelompok diberbagai area kebijakan (Adriyus, 2015).

Teori rezim perkotaan berasumsi bahwa efektivitas pemerintahan daerah sangat bergantung pada kerja sama para pelaku nonpemerintah dan pada kombinasi kapasitas negara dengan sumber daya nonpemerintah. Kesejahteraan ekonomi bergantung pada investasi swasta. Namun, intinya lebih luas, bahwa agar efektif, pemerintah harus memadukan kapasitas mereka dengan kapasitas berbagai pelaku nonpemerintah. Perbedaan antara sector publik dan sector swasta dapat dibuat secara konseptual, tetapi juga dapat menjadi panduan yang sangat menyesatkan terhadap realitas empiris. Realitas tersebut adalah kenyataan di mana kegiatan pemerintah dan bisnis saling terkait erat, seperti halnya kegiatan pemerintah dan nirlaba. Ini bukan berarti bahwa pemerintah dalam lembaga yang tidak penting atau bahwa pejabat public tidak dapat menggalang dukungan dan mobilisasi upaya atau nama tujuan sosial yang luas. Sebaliknya ini adalah untuk menkankan bahwa dalam tatanan liberal, banyak kegiatan dan sumber daya yang penting bagi kesejahteraan keberadaan masyarakat bersifat nonpemerintah dan fakta itu memiliki konsekuensi politik (Stone et al., 1993).

Urban Regime Theory mengacu pada hubungan antara pemerintah lokal dan aktor-aktor non-pemerintah yang berkolaborasi untuk mengatur kota dan mempengaruhi arah pembangunan. Clarence Stone mengemukakan bahwa di banyak kota, kekuasaan politik tidak hanya terpusat pada pemerintah resmi, tetapi juga melibatkan koalisi informal yang terdiri dari pengusaha, pemimpin komunitas, dan kelompok lainnya yang memiliki sumber daya penting.

Teori ini berakar pada pemikiran bahwa kota tidak bisa diatur secara efektif hanya melalui kekuasaan formal pemerintah. Sebaliknya, pengaturan kota membutuhkan kerja sama dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda. Koalisi ini dikenal sebagai urban regime atau rezim perkotaan. Clarence Stone, dalam karyanya, mengembangkan teori *urban regime* yang menekankan pada bagaimana koalisi kekuasaan di kota terbentuk dan beroperasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Stone, *urban regime* adalah bentuk pengaturan politik yang informal, di mana aktor-aktor dari sektor pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil berkoalisi untuk mengendalikan keputusan-keputusan penting terkait kebijakan perkotaan. Ada beberapa poin penting dari teori ini:

- **Koalisi Aktor:** *Urban regime* melibatkan koalisi antara aktor-aktor kunci di kota, seperti pemerintah (eksekutif dan legislatif), Swasta, Masyarakat dan organisasi masyarakat. Koalisi ini terbentuk berdasarkan kepentingan bersama dan saling ketergantungan dalam mencapai tujuan tertentu.
- **Kekuasaan Informal:** Stone berargumen bahwa kekuasaan dalam *urban regime* lebih bersifat informal, dengan pengaruh yang tidak hanya datang dari lembaga formal tetapi juga dari hubungan dan kesepakatan informal di antara aktor-aktor tersebut.
- **Sumber Daya dan Mobilisasi:** Teori ini juga menekankan pada bagaimana sumber daya (finansial, sosial, dan politik) dimobilisasi oleh aktor-aktor dalam koalisi untuk mendukung agenda pembangunan kota.

Stone mengidentifikasi beberapa tipe rezim perkotaan yang bisa terbentuk, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik setempat: *Maintenance Regime*: Berfokus pada mempertahankan status quo dan menyediakan layanan dasar tanpa mendorong perubahan signifikan. *Developmental Regime*: Lebih berorientasi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Biasanya melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan pada proyek-proyek besar, seperti pengembangan properti atau pembangunan infrastruktur. *Middle-Class Progressive Regime*: Menekankan pada kebijakan yang mendukung kualitas hidup kelas menengah, seperti pendidikan dan lingkungan. *Lower-Class Opportunity Expansion Regime*: Mengutamakan kebijakan yang meningkatkan peluang ekonomi bagi kelas bawah, meskipun rezim ini lebih jarang terjadi (Hochschild, 2008).

Teori ini membawa implikasi penting dalam pemahaman tentang bagaimana kebijakan publik kota dihasilkan. Salah satu implikasinya adalah bahwa untuk memahami kekuasaan di kota, kita harus melihat lebih dalam pada jaringan informal dan interaksi antara aktor-aktor yang berbeda, bukan hanya pada struktur pemerintahan formal (Hochschild, 2008). Urban Regime Theory memberikan kerangka yang kaya untuk menganalisis bagaimana kebijakan perkotaan dibentuk dan dijalankan, terutama dalam konteks kota-kota besar di negara-negara maju. Namun, relevansinya juga dapat diuji dalam konteks perkotaan di negara berkembang, di mana dinamika kekuasaan bisa berbeda secara signifikan.

Dengan Demikian teori *urban regime* dari Clarence Stone memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami dinamika politik dalam pembangunan Waterfront City di Kabupaten Majene. Dengan melihat bagaimana koalisi pro dan kontra terbentuk serta bagaimana mereka memobilisasi sumber daya dan pengaruhnya, kita dapat lebih memahami kompleksitas politik yang terlibat dalam proses pembangunan kota. Penerapan teori ini juga membantu dalam mengidentifikasi kepentingan dan strategi yang digunakan oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuan mereka dalam konteks pembangunan perkotaan.

1.4.2 Konsep Waterfront City

Konsep *Waterfront City* pertama kali diterapkan pada abad ke 19 oleh James Rouse untuk merevitalisasi kawasan industri di kawasan pesisir San Fransisco, Boston, Amerika Serikat. *Waterfront City* secara bahasa berarti daerah tepi laut atau bagian daratan yang berbatasan dengan air. Umumnya *Waterfront City* terdapat di pelabuhan sebagai pusat kesibukan lalu lintas perdagangan dengan sarana transportasi seperti kapal, perahu dan *boat*. Sedangkan pandangan dari Marone membahasakan *Waterfront City* adalah area yang berada di perbatasan daratan dan perairan dimana didalamnya terdapat beragam kegiatan seperti ekonomi, sosial dan budaya (Zain, 2022).

Waterfront City adalah suatu kawasan yang memiliki tata ruang yang khusus untuk dikelola dengan baik. Mengacu pada tanah dan bangunan dalam suatu wilayah tertentu dan berdekatan dengan danau, aliran air, dan tentunya berdekatan dengan badan air kota. Dan memiliki kumpulan karakteristik yang terdiri dari komponen spasial

alam dan spasial ekonomi serta system ruang. Sehingga, ini menunjukkan bahwa lanskap yang ada di tepi laut kota dibentuk sesuai dengan karakteristik wilayah itu sendiri dan berfokus pada pembentukan ruang yang memiliki kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan situasi tepi laut kota saat ini, memanfaatkan sepenuhnya ruang bangunan perkotaan dan memanfaatkan lanskap ekologi perkotaan dan gagasan penghijauan untuk membentuk hubungan lanskap yang harmonis, dan ciptaan lingkungan tepi aut perkotaan yang indah dengan latar belakang budaya yang kaya (Ying, 2020).

Tepi laut (*Waterfront City*) memberikan manusia sarana untuk menopang kehidupan melalui pemanfaatannya. Tepi laut memiliki peran penting dalam konteks perkotaan melalui pengembangan kota dan pada orang-orang yang bermukim disekitaran pesisir. Kesehatan fisik, fisiologis dan psikologis. Ruang perairan yang terbuka luas mempengaruhi masyarakat dengan tekanan afiliasi, eksposisi, dan mendorong sosialisasi yang tinggi dibandingkan dengan lingkungan alam lainnya. Akan tetapi, pembangunan *Waterfront City* bukan hanya dilihat dari dampak positif yang akan diberikan, akan tetapi dampak negatif juga harus di perhatikan. Untuk penggunaan konsep *Waterfront City* harus memenuhi dan pro terhadap poros kebijakan yang berkelanjutan (Othman et al., 2021).

Meunurut Breen dan Rigby bahwa *Waterfront City* dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu berdasarkan tipe pembangunan dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan tipe pembangunan dibagi menjadi tiga bagian yaitu, *Conservation*, *Redevelopment* dan *Development*. Sedangkan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi empat bagian, yaitu, *Mixed-Used Waterfront City*, *Recreational Waterfront*, *Residential Waterfront*, dan *Working Waterfront* (Zain, 2022).

1.4.3 Konsep Politik Pembangunan

Politik pembangunan adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan nasional Indonesia. Kenerhasilan-keberhasilan dalam pembangunan akan membawa dampak yang sangat baik terhadap iklim. Iklim yang kondusif bagi keberhasilan pembangunan secara keseluruhan, sebaliknya keberhasilan pembangunan diberbagai bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya juga akan memperlencar politik pembangunan. kegalalan dalam politik pembangunan sudah pasti akan membawa dampak negatif, dapat mengganggu pembangunan nasional secara keseluruhan (Hudi, 2020). Dapat dikatakan ketika politik pembangunan merupakan persyaratan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Politik pembangunan dapat membentuk berbagai wahana yang mutlak diperlukan untuk menggerakkan roda pembangunan di nasional ataupun di daerah-daerah.

Politik pembangunan adalah sebuah disiplin yang mengkaji bagaimana kekuasaan, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan berinteraksi dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di suatu wilayah. Konsep ini bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai aktor—termasuk pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil—berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan, serta bagaimana kekuatan-kekuatan politik mempengaruhi distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan.

Menurut David Harvey (2005), politik pembangunan sering kali dipandang sebagai tempat terjadinya konflik antara golongan sosial, kelompok-kelompok kepentingan, swasta dan lembaga. Harvey menjelaskan dalam bukunya *A Brief History of Neoliberalism* bahwa urbanisasi dan pembangunan sering digunakan sebagai alat untuk memperkuat dan memperluas kapitalisme global melalui proses yang dikenal sebagai akumulasi dengan pemisahan. Proses ini didasarkan pada bagaimana sumber daya publik dan sumber daya digunakan bersama-sama untuk kepentingan sektor swasta, yang sering mengakibatkan marginalisasi.

Dalam konteks pembangunan politik, kekuasaan tidak hanya merujuk pada perspektif resmi yang dipegang oleh pemerintah; Hal ini juga mencakup bentuk-bentuk pemikiran yang lebih bernuansa atau dinamis, seperti manipulasi media, lobi politik, dan mobilisasi sosial. Dalam bukunya *"Discipline and Punish"* Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan masyarakat hadir dalam setiap aspek dan fungsi melalui berbagai mekanisme, termasuk hukum konstruksi. Dalam konteks ini, pembangunan menjadi sebuah landasan di mana berbagai pemangku kepentingan ingin berkontribusi untuk mengurangi biaya sehari-hari dan menentukan arah proyek.

Antonio Gramsci (1971) menjelaskan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana sebuah kelompok yang dominan menjunjung tatanan sosial dengan membentuk konsensus melalui ideologi bersama di seluruh masyarakat. Dalam kebijakan pembangunan, hegemoni terlihat ketika proyek-proyek berskala besar, seperti infrastruktur atau modernisasi kota, dipromosikan sebagai "demi kepentingan semua", menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti korporasi besar atau elit politik, sementara kelompok-kelompok marjinal menderita.

Politik pembangunan adalah suatu konsep yang merujuk pada interaksi antara kekuasaan politik dan kebijakan pembangunan dalam suatu negara atau wilayah. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks politik pembangunan, kekuasaan politik digunakan untuk mengarahkan sumber daya, menetapkan prioritas, dan menentukan arah kebijakan pembangunan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Politik pembangunan juga melibatkan negosiasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat sipil. Interaksi ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, ideologi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing aktor. Oleh karena itu, proses politik dalam pembangunan sering kali bersifat dinamis dan dapat memunculkan konflik atau konsensus, tergantung pada bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut dikelola.

Selain itu, politik pembangunan juga mencerminkan hubungan kekuasaan yang ada di masyarakat, di mana pihak yang memiliki kekuasaan cenderung mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dalam beberapa kasus, politik pembangunan dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan oleh pihak tertentu, yang mungkin berdampak positif atau negatif terhadap keberhasilan program-program pembangunan.

Dalam analisis akademis, politik pembangunan juga dipelajari dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, bagaimana kebijakan publik diformulasikan, dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap distribusi kesejahteraan. Studi tentang politik pembangunan sering kali mencakup pendekatan multidisiplin yang menggabungkan perspektif ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dan antropologi, untuk memahami kompleksitas interaksi antara kekuasaan dan pembangunan.

Secara keseluruhan, politik pembangunan merupakan suatu kerangka analisis yang esensial untuk memahami bagaimana proses pembangunan dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan bagaimana kebijakan pembangunan diimplementasikan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang spesifik.

1.4.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah temuan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini berupaya untuk mencari perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Pembahasan
Rochana Esti Pramesti	Pembangunan Kembali tepi laut perkotaan yang berkelanjutan : tantangan dan masalah utama.	Dalam penelitian ini membahas dan menjelaskan bahwa Kawasan tepi laut perkotaan memang merupakan lingkungan yang menantang, Dimana perencanaan kota terus menerus ditantang oleh tiga sektor pilar yaitu: ekonomi, social dan ekologi. Permasalahan dalam mengatasi Pembangunan Kembali tepi laut perkotaan mencakup keragaman ekonomi, identitas social, pergeseran lahan yang dimungkinkan oleh kebijakan perkotaan rekonsiliasi konflik kepentingan.
Ismah Tita Ruslih	<i>Subaltern</i> dan kebijakan Pembangunan perkotaan tepi laut.	Secara jelas penelitian ini menjelaskan bahwa ada salah satu penduduk yang menjadi korban dalam

		konflik kepentingan antara beberapa actor yang memiliki kekuasaan atau kuasa atas Pembangunan reklamasi Pantai tersebut yang dinamakan <i>Subaltern</i>. Dan mencoba menjelaskan bahwa bagaimana setiap kebijakan Pembangunan kota akan berdampak pada Masyarakat kecil dalam hal ini adalah Masyarakat pesisir (Nelayan). Dengan memakai istilah <i>Subaltern</i>, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini berusaha menguraikan bahwa kebijakan reklamasi Pantai ada penduduk yang secara social, politis, dan geografis di luar lingkaran kekuasaan. Sehingga penduduk tersebut akan selalu terpinggirkan bahkan direnggut kesejahteraan akibat tidak ada kemampuan melawan aktor-aktor yang memiliki kuasa.
Sultan Khalid Zaki dan Ibrahim Rizk Hegazy	Menyelidiki Tantangan dan Peluang Pengembangan Tepi Laut Berkelanjutan di Kota Jeddah.	Penelitian berusaha menjelaskan tantangan dan peluang seputar pengembangan tepi laut berkelanjutan di Kota Jeddah, Arab Saudi. Kota ini menghadapi tantangan seperti infratraktur yang tidak memadai dan urbanisasi yang tergesa-gesa. Dari aspek ekonomi sangat membantu dalam kemajuan perkotaan, karena dapat memperoleh dan membuka serta memberikan peluang bagi

		Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, akan tetapi ada beberapa tantangan dalam Pembangunan <i>Waterfront City</i>. Tantangan ekonomi yang berkaitan pendanaan, karena ini adalah proyek yang sangat membutuhkan dana besar. Tantangan social seperti peningkatan kemiskinan diakibatkan oleh penggusuran tempat penduduk atau tempat usaha. Sehingga berdampak buruk terhadap tatanan social Masyarakat. Akan tetapi, setiap tantangan yang terjadi tergantung bagaimana para pembuat kebijakan mengartikan arti dari pemanfaatan kota tepian laut.
Sakinan Nadir	Rezim Kebijakan Dalam Dinamika Kebijakan Pembangunan Kota	Jurnal yang Anda unggah membahas teori Urban Regime dalam konteks kebijakan pembangunan kota. Teori ini menjelaskan bagaimana aktor dominan, terutama dari sektor publik dan swasta, membentuk kebijakan pembangunan perkotaan yang mempengaruhi arah dan kebijakan kota. Fokus utama artikel ini adalah pentingnya interaksi antar aktor yang membentuk koalisi dalam menentukan kebijakan dan bagaimana kepentingan aktor-aktor ini mengarahkan pembangunan yang dapat berpengaruh pada

		kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jurnal ini juga mengkritik pandangan yang menganggap pemerintah sebagai aktor tunggal dalam kebijakan pembangunan, serta menekankan perlunya pemahaman tentang dinamika internal koalisi dan interaksi antar kelembagaan.
--	--	--

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rochana Esti Pramesti dengan judul “Pembangunan Kembali Tepi Laut Perkotaan yang Berkelanjutan: Tantangan dan Masalah Utama”. Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama berfokus mengkaji pembangunan tepi laut atau *Waterfront City*. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rochana Esti Pramesti hanya menggambarkan tantangan dan masalah utama akibat adanya pembangunan kembali tepi laut. Secara jelas penelitian ini berusaha memberikan gambaran umum bahwa pembangunan tepi laut akan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan penelitian tesis ini lebih mengedepankan aspek politiknya, yaitu bagaimana aktor-aktor yang kemudian saling berinteraksi dalam merumuskan kebijakan program pembangunan *Waterfront City*.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ismah Tita Ruslih dengan judul “Subaltern dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai di Kota Makassar”. Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama berfokus mengkaji kebijakan pembangunan perkotaan tepian laut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ismah Tita Ruslih lebih ingin menjelaskan bahwa ada salah satu penduduk yang menjadi korban dalam konflik kepentingan antara beberapa aktor yang memiliki kuasa atas pembangunan reklamasi pantai tersebut yang dinamakan Subaltern. Sedangkan penelitian tesis ini akan lebih berusaha menggambarkan dan menganalisa lebih dalam tentang aktor-aktor dominan yang menjadi kunci dalam kebijakan program pembangunan tepian laut. Karena setiap aktor akan membawa kepentingan masing-masing, kemudian kepentingan yang melekat pada aktor akan sangat berdampak pada hasil rumusan kebijakan terkait pemanfaatan tepian laut.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sultan Khalid Zaki dan Ibrahim Rizk Hegazy dengan judul “Menyelidiki Tantangan dan Peluang Pengembangan Tepi Laut Berkelanjutan di Kota Jeddah”. Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama berfokus mengkaji pembangunan kota tepian laut. Perbedaan dalam penelitian ini sangat jelas, penelitian yang dilakukan oleh Sultan Khalid Zaki dan Ibrahim Rizk Hegazy, menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh salah satu kota di Arab Saudi. Penelitian

ini menganalisa tantangan dan dampak apa saja yang akan ditimbulkan oleh pembangunan *Waterfront City* ketika diimplementasikan. Sedangkan penelitian tesis ini akan lebih menggambarkan bagaimana interaksi aktor atau keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pembangunan kota menggunakan program *Waterfront City*. Karena tidak bisa kita hindarkan bahwa rezim yang berkuasa pada suatu daerah/kota akan mengambil alih arah kebijakan pembangunan kota tersebut. dan dalam penelitian tesis ini akan memisahkan aktor formal dan informal dan melihat siapa yang kemudian menjadi aktor yang paling dominan dalam hal kebijakan pembangunan perkotaan.

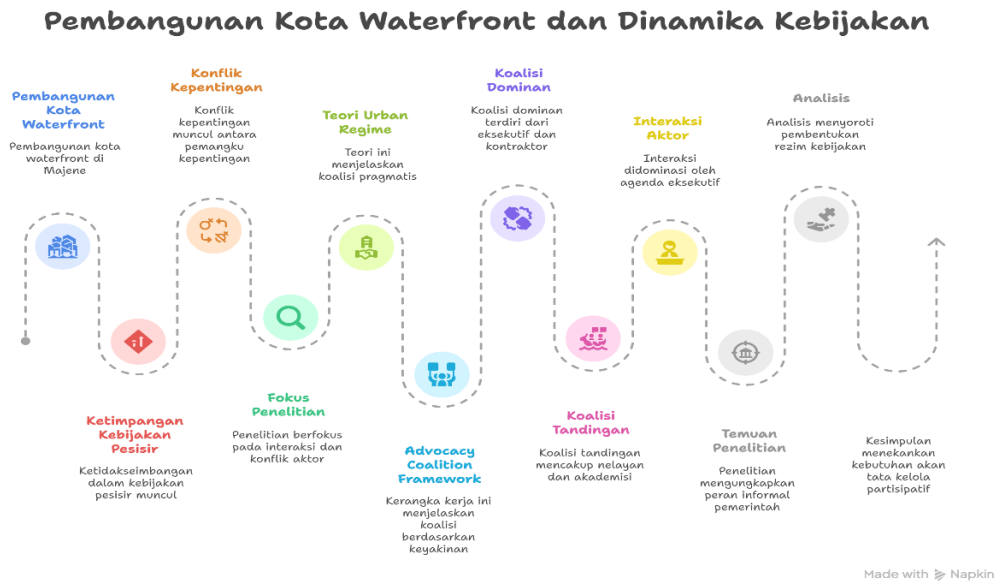
Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sakinah Nadir dengan judul “Kebijakan Rezim Dalam Pembangunan Kota”. Persamaan kesamaan karena sama-sama menggunakan *Urban Regime Theory* untuk melihat bagaimana koalisi kekuasaan terbentuk dalam pembangunan kota. Fokus pada peran aktor-aktor dominan dan proses interaksi mereka dalam menentukan arah kebijakan juga menjadi benang merah antara keduanya. Namun, perbedaan mencolok terletak pada konteks dan pendekatan. Jurnal ini bersifat teoritis dan mengambil contoh dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa, sementara tesis Anda secara spesifik meneliti pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene. Anda juga menggabungkan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) untuk menjelaskan bagaimana koalisi kebijakan terbentuk berdasarkan kepercayaan dan kepentingan aktor dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian Anda menyoroti ketidaksesuaian pembangunan dengan tata ruang, dampak terhadap masyarakat nelayan, serta rendahnya partisipasi publik—isu-isu yang tidak menjadi fokus utama dalam jurnal tersebut. Dengan demikian, tesis Anda memberikan kontribusi kontekstual dan aplikatif yang lebih dalam terhadap studi pembangunan kota di Indonesia.

1.4.5 Skema Berpikir

Pelaksanaan pembangunan kota dilatarbelakangi oleh adanya kepadatan penduduk, ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas pendapatan daerah dengan melakukan pembangunan seperti gedung, hotel, pariwisata, taman kota dan sebagainya. Pembangunan sangat berkaitan dengan aturan yang berlaku di daerah atau wilayah masing-masing. Kabupaten Majene adalah salah satu kota yang mengalami perubahan dengan melakukan pembangunan dengan memanfaatkan kekayaan pesisir yang dimilikinya.

Berdasarkan “Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majene Tahun 2020-2040, di dalam pasal 33 alinea ke 2 menjelaskan bahwa subzone wisata buatan (W-2) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a seluas 29,34 hektar terdiri atas; salah satunya pembangunan *Waterfront City*. Kemudian juga diatur dalam “Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2032. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa isu strategis penataan ruang di Kabupaten Majene salah satunya adalah pembangunan *Waterfront City* Kota Majene.

Namun, dalam tentu disetiap kebijakan pembangunan akan melahirkan pro dan kontra, itu adalah hal yang tidak bisa dihindarkan, karena pembangunan kota akan melibatkan aktor baik itu formal maupun informal yang mempunyai kepentingan masing-masing. Sehingga Tarik menarik kepentingan akan terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengimplementasian regulasi tersebut. Apalagi pembangunan perkotaan akan selalu berdampingan dengan dampak sosial, politik, ekonomi bahkan lingkungan.



Gambar 1. Skema Berfikir
Sumber: Pemikiran Penulis

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian atau penggunaan metode ilmiah yang disusun dengan baik dan sistematis akan membantu peneliti untuk melakukan kajian ilmiah, baik itu mengkaji ilmu-ilmu social atau mengkaji ilmu-ilmu alam. Dikatakan demikian karena ilmu pengetahuan dianggap sebagai produk (*a body of organized and verified knowledge*). Sebagaimana dinyatakan Harton dan Hunt, jelas merupakan hasil telaah atau melakukan investigasi secara ilmiah. Metode penelitian adalah senjata bagi penulis untuk, karena dengan adanya metode penelitian, maka sangat membantu peneliti untuk menemukan data-data yang berhubungan dengan topic yang di angkat atau dikaji oleh seorang peneliti. Semakin pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan, dari awal sampai sekarang ini, tidak jauh karena beberapa kontribusi yang diberikan oleh para ahli dalam melakukan penelitian sebelumnya. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang selama ini digunakan untuk menyingkap rahasia social. (Faisal, 2010)

Namun, sering kali ada menyamakan arti dari “metode” dan “metodologi”, padahal ketika kita membaca beberapa buku tentang metodologi, maka kita akan menemukan perbedaannya secara jelas. Simplenya pemaknaan kata “metodologi” adalah berasal dari bahasa yunani “methodologia” yang memiliki arti “teknik atau prosedur”. Artinya bahwa metodologi sendiri merujuk pada alur pemikiran yang bersifat umum atau menyeluruh (general logic) dan gagasan teoritis (theoretic perspectives) dalam suatu research. Sedangkan, kata “metode” merujuk kepada teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian di lapangan, seperti teknik survey, wawancara, dan observasi. (Raco, 2010)

2.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti memiliki peran penting disini sebagai instrument kunci. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tipe penelitian yang bersifat kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang secara umum dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktifitas social dan sebagainya. (Rahmat, 2009)

Penelitian kualitatif adalah metode yang memiliki beberapa perspektif teori yang akan mendukung penulis untuk melakukan analisa lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi atau berkaitan dengan topic yang akan ditulis oleh peneliti. Sebab, kajian dari pendekatan kualitatif itu adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis) yang sangat sulit diukur dengan menggunakan angka-angka. Karena penelitian ini membutuhkan analisa yang lebih jauh dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. (Creswell, 2012)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena secara mendalam, terutama terkait dengan dinamika politik dalam pembangunan Waterfront City di Kabupaten Majene. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu ini secara lebih mendalam dan detail, mengingat kompleksitas konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi.

Juga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ini akan berusaha memotret lewat perspektif politik terkait pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene. Berusaha menggambarkan relasi aktor-aktor yang kemudian memainkan peran dan kepentingannya dalam kebijakan pembangunan tersebut. Menganalisa perumusan kebijakan pembangunan *Waterfront City* sampai dengan strategi dan implementasi pembangunan *Waterfront City* tersebut. Karena secara umum berkaitan dengan politik pembangunan perkotaan akan berdampingan dengan isu sosial, ekonomi dan lingkungan. Dan kabupaten Majene mungkin memiliki dinamika politik lokal yang unik, termasuk hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana keputusan politik diambil dan bagaimana pro dan kontra terhadap pembangunan Waterfront City direspon oleh berbagai pihak.

2.2. Lokasi dan Lokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dengan fokus pada area yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Waterfront City. Dan adapun alasan saya memilih Kabupaten Majene sebagai lokasi penelitian, karena Kabupaten Majene adalah kota yang memiliki karakteristik. Kabupaten Majene memiliki garis pantai yang panjang, menjadikannya tempat yang potensial untuk pengembangan kawasan pesisir seperti Waterfront City.

Adapun lokus penelitian mengacu pada proses dan dinamika politik pembangunan yang terjadi dalam konteks pelaksanaan proyek *Waterfront City* tersebut. Lokus ini mencakup arena kebijakan di mana terjadi interaksi, negosiasi, dan bahkan konflik antar-aktor yang terlibat, baik dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat lokal, maupun organisasi masyarakat sipil. Objek utama penelitian ini adalah dinamika hubungan antarpemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, termasuk bagaimana koalisi kebijakan terbentuk serta bagaimana konflik kepentingan muncul dan ditangani.

Dengan menempatkan Kabupaten Majene sebagai lokasi serta dinamika kebijakan pembangunan pesisir sebagai lokus, penelitian ini berupaya menguraikan secara empiris bagaimana relasi kuasa, konflik kepentingan, serta proses koalisi memengaruhi arah pembangunan kota di wilayah pesisir yang rentan secara ekologis maupun sosial. Penelitian ini juga menekankan pentingnya memahami konteks lokal dalam kebijakan pembangunan, terutama ketika proyek yang diusung mengubah secara signifikan ruang hidup dan pola ekonomi masyarakat.

2.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dan terdampak oleh rencana pembangunan Waterfront City di Kabupaten Majene. Subjek penelitian meliputi:

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Majene: Pejabat dan pegawai di berbagai dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Terkait Lainnya, dan Bappeda.
- b) Masyarakat Lokal: Warga yang berada di sekitar area pembangunan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.
- c) Tokoh Masyarakat dan Adat: Pimpinan adat dan tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.
- d) Akademisi dan Aktivis: Akademisi yang memiliki kajian terkait pembangunan kota dan aktivis yang menyoroti isu lingkungan serta sosial dalam pembangunan ini.
- e) Pihak swasta yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam proyek pembangunan ini.

2.4 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan juga ada beberapa data yang dijadikan tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya, sebagai berikut:

2.4.1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan Waterfront City. Informan tersebut terdiri dari pejabat pemerintah daerah, seperti dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bappeda Kabupaten Majene, Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain aktor pemerintah, informan juga mencakup perwakilan dari masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan ini, tokoh masyarakat lokal, akademisi, serta perwakilan organisasi lingkungan hidup yang aktif dalam isu tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur agar memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam dan fleksibel sesuai dinamika lapangan. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung di lokasi pembangunan, termasuk mencermati kondisi fisik proyek, perubahan lingkungan pesisir, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang berlangsung di sekitar kawasan Waterfront City. Seluruh data ini direkam, dicatat, dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis pada kategori tematik yang sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

2.4.2 Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen dan literatur yang relevan dengan konteks penelitian. Data ini mencakup dokumen perencanaan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene, dokumen studi kelayakan proyek Waterfront City, dokumen Laporan pembangunan, dan dokumen lainnya. Selain dokumen kebijakan, data sekunder juga diperoleh dari laporan media lokal, jurnal ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, serta buku atau artikel yang membahas teori dan praktik pembangunan kota, konflik tata ruang, dan governance di wilayah pesisir.

Data sekunder berfungsi sebagai bahan triangulasi untuk menguatkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari data primer, sekaligus memberikan konteks historis dan kebijakan yang lebih luas terhadap dinamika pembangunan di Majene. Penggunaan data sekunder juga mendukung validitas temuan dengan menghadirkan perspektif dari sumber tertulis yang telah terdokumentasi secara resmi maupun ilmiah.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data, tanpa memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ingin dikumpulkan. (Hardani, 2020) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, penentuan sampel, wawancara, dan dokumentasi, adapun penjelasannya, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

2.5.1. Wawancara

Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan berbagai informan kunci. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi yang lebih dalam tentang pandangan, sikap, dan pengalaman subjek penelitian terkait pembangunan Waterfront City. Wawancara adalah sumber data dan informasi yang didapat dengan tujuan penggalian informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen, wawancara adalah percakapan atau pengumpulan data yang mempunyai tujuan, dan biasanya dilakukan dengan dua orang atau lebih yang diarahkan oleh salah satu seseorang dengan maksud memperoleh dan mendapatkan keterangan yang mendalam. (Salim, 2012) Prosedur melakukan wawancara, bagaimana pewawancara membangun hubungan emosional dengan informan, dengan memberikan kesan yang baik pada pertemuan pertama, menjelaskan dan memberitahu tujuan penelitian, dimana dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu implementasi kebijakan mitigasi, dan tentunya meyakinkan subjek bahwa apa data yang kita ambil akan disimpan dan tidak akan disebarluaskan, data digunakan dalam pengembangan dunia akademisi. Secara umum pembagian informan dibagi dalam menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, Informan kunci adalah mereka yang lebih mengetahui informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Kedua*, informan biasa adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Dan *Ketiga*, informan

tambahan adalah mereka yang bisa memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang di kaji. (Burhan, 2015).

Tabel 2. Narasumber

Aktor	
Eksekutif	Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait
Legislatif	Anggota DPRD Kabupaten Majene
Organisasi Lokal, LSM	ASNP (Aliansi Selamatkan Nelayan Pesisir)
Mayarakat	Masyarakat Pesisir atau Warga yang terdampak

2.5.2. Observasi

Observasi Partisipatif: Observasi adalah proses pengamatan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik dari pengumpulan data: (1) apabila sesuai dengan tujuan yang akan diteliti (2) melakukan perencanaan dan pencatatan secara runtut, dan (3) bisa dikontrol keadaannya (realibilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Sama halnya yang dibahasakan oleh seorang ahli bernama Sukmadinata, bahwa observasi adalah hal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakuka *observation*, pengamat dapat melakukan dua pengamatan secara partisipatif maupun nonpartisipatif. Partisipatif adalah bagaimana peniliti melakukan pengamatan dengan ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan dalam nonpartisipatif adalah bagaimana peneliti tidak ikut berpartisipasi secara langsung dan hanya melakukan pengamatan, tanpa ikut dalam kegiatan. (Hardani, 2020) Peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan, berpartisipasi dalam pertemuan atau diskusi yang membahas proyek ini. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial dan politik di sekitar proyek.

2.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi: Dokumentasi adalah cara lain untuk mengumpulkan beberapa data yang akan mendukung hasil penelitian. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara memperoleh data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Tentu metode lebih ringan dan mudah dibandingkan dengan beberapa metode pengumpulan data yang dijelaskan sebelumnya. Seorang ahli bernama Sugiyono, menjelaskan bahwa dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau. Dokumen dapat berbentuk *Picture, Written, or ware* monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, *life histories*, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar yang hidup, sketsa, dan sebagainya. Kemudian, dokumentasi yang berbentuk karya misalnya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Hardani, 2020) Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan resmi pemerintah, berita di

media massa, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan proyek pembangunan ini.

2.6. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga tahap dalam melakukan analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman bahwa dalam analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga bagian, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar sudah terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. (Noor, 2015) Adapun penjelasan dari ketiga bagian untuk analisis data, sebagai berikut:

2.6.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti melakukan penajaman, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Kemudian melakukan pengorganisasian data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dengan reduksi data, maka data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketata. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. Reduksi data berfungsi untuk lebih menajamkan data-data yang didapatkan selama penelitian, kemudian merubah data tersebut agar simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi dengan baik dan benar.

2.6.2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan data atau informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, berbentuk bagan, hubungan antara kategori, flowcard dan semacamnya. Dengan melakukan display data, maka akan membantu peneliti untuk lebih mengerti dan paham apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

2.6.3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah yang terakhir, namun simpulan yang ditentukan di awal masi bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh beberapa bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti melakukan pengecekan kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang di susun di awal berarti sudah kredibel. (Hardani, 2020) Simpulan adalah insisari dari beberapa temuan penelitian yang akan menggambarkan dan menguraikan beberapa pendapat-pendapat terakhir yang sesuai pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang disusun harus sesuai dengan focus

penelitian, tujuan penelitian, dan pembahasan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

2.7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan waktu yang menyebabkan data yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh perspektif yang ada. Selain itu, dinamika politik yang cepat berubah juga bisa mempengaruhi relevansi temuan pada waktu tertentu.